



Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan Dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2023-2025

Zaraby Firdaus¹, Hanifatul Fitriya Fauzia², Revienda Anita Fitri³, Eva Hany Fanida⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 25040674064@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674055@mhs.unesa.ac.id², reviendafitrie@unesa.ac.id³, evafanida@unesa.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the Department of Industry and Trade (Disperindag) of Pamekasan Regency in utilizing public funds, implementing key programs for 2025, and identifying the factors contributing to the suboptimal regional revenue from the market sector. This study employs a descriptive qualitative approach using digital research methods, including document analysis, program reports, and publicly available information related to the budget and performance of Disperindag. The findings indicate that the Department of Industry and Trade of Pamekasan Regency has implemented transparency in budget utilization by publishing clear program plans and detailed expenditure reports. The total program budget for 2025 is IDR 786,000,000. The priority programs include low-cost market operations, monitoring of prices and basic commodity stocks, market management, development of distribution facility managers, and activities in the industrial sector. These programs provide positive benefits to the community, particularly in maintaining price stability, increasing purchasing power, and improving public service delivery. However, challenges remain in the market sector, particularly a decrease in Regional Original Revenue (PAD) of approximately IDR 1.1 billion. This decline is influenced by changes in budget targets, limited market potential, and external factors such as natural conditions and the relocation of traders. Therefore, further evaluation and improvement of management strategies, including the adoption of electronic systems, are necessary to optimize regional revenue.

Keywords: Accountability, Budget, Local Own-Source Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan dalam menggunakan dana milik masyarakat, program-program utama tahun 2025, serta mengidentifikasi penyebab mengapa pendapatan daerah dari sektor pasar masih belum mencapai tingkat yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian digital, yaitu melalui pencarian dokumen, laporan program, dan informasi publik yang berkaitan dengan anggaran dan hasil kerja Disperindag. Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan transparansi dalam penggunaan anggaran dengan menerbitkan program dan detail pengeluaran yang jelas. Total anggaran program untuk tahun 2025 adalah Rp786.000.000. Program prioritas yang dilakukan mencakup pasar murah, pemantauan harga dan stok bahan pokok, pengelolaan pasar, pembinaan pengelola sarana distribusi, serta kegiatan di bidang perindustrian.

Program tersebut memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga harga barang tetap stabil, meningkatkan kemampuan beli masyarakat, serta memperkuat pelayanan yang diberikan kepada publik. Namun, masih ada masalah di sektor pasar, yaitu penurunan pendapatan asli daerah sekitar Rp1,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh perubahan target anggaran, batasan potensi pasar, serta faktor luar seperti kondisi alam dan perpindahan kegiatan para pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pengevaluasian dan pengembangan cara pengelolaan, termasuk penggunaan sistem elektronik agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.

Kata kunci: Akuntabilitas, Anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting pada *Good Governance* yang memiliki arti suatu bentuk upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat atas segala aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Hal tersebut diterapkan agar pemerintah dapat bekerja secara efektif dan transparan dalam setiap tujuan yang telah mereka tetapkan. Adanya laporan hasil kinerja dan laporan penggunaan setiap anggaran yang digunakan untuk mendorong terealisasinya pemerintahan yang transparan.

Menurut (Mardiasmo, 2009), akuntabilitas publik dalam konteks pemerintahan merupakan kewajiban pihak pemerintah untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas serta kebijakan yang telah dirancang dan dilaksanakan kepada masyarakat. Argumen ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban menyusun laporan keuangan secara internal, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien, dan efektif kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas publik mengandung unsur transparansi, keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah.

Dalam praktiknya, akuntabilitas publik mencakup akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas kinerja menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan serta hasil yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas yang optimal menjadi tolak ukur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja pemerintah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) dan pelayanan publik. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, kinerja tidak hanya dimaknai sebagai hasil kerja semata, tetapi sebagai capaian yang dihasilkan melalui proses kerja yang tersusun, terukur, dan terencana. Menurut Emron Edison (2016), kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu yang telah disepakati bersama, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi ini menegaskan bahwa kinerja memiliki indikator yang jelas, serta standar evaluasi.

Adapun beberapa kinerja yang telah terlaksana pada tahun 2025 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Pasar Murah dalam rangka HUT RI ke-80, Kegiatan pasar murah ini diselenggarakan sebagai bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dasar dengan harga di bawah harga pasar. Komoditas yang dijual umumnya meliputi beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Program ini tidak hanya berdampak pada penghematan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah. Dari sisi keuangan publik, kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk perlindungan daya beli masyarakat.

Bazar TMMD Tahun 2025, Bazar dalam rangka kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) menjadi kerja sama antara pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Dalam bazar ini, berbagai kebutuhan pokok dan produk UMKM dijual dengan harga terjangkau. Secara ekonomi, kegiatan ini memiliki dua fungsi utama, yang pertama membantu masyarakat memperoleh barang dengan harga subsidi atau diskon. Fungsi kedua mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha kecil. Sehingga dari dua fungsi utama tersebut mencerminkan pengelolaan program ekonomi yang terencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bazar Sembako Murah Selama Ramadhan 2025, Menjelang dan selama bulan Ramadhan, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat sehingga berpotensi memicu kenaikan harga. Sehingga Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan merespons kondisi tersebut dengan menyelenggarakan bazar sembako murah untuk menekan kenaikan harga serta menjaga stabilitas pasar. Program ini sangat relevan dalam konteks manajemen keuangan publik karena berfungsi sebagai langkah antisipasi terhadap inflasi musiman. Selain itu, kegiatan ini membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi selama bulan suci Ramadhan tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.

Pamekasan Big Sale Harjad ke-495 Tahun, Program “*Big Sale*” dalam rangka hari jadi Kabupaten Pamekasan ke-495 merupakan strategi promosi perdagangan yang melibatkan pelaku usaha dan pusat perbelanjaan. Kegiatan ini mendorong pemberian potongan harga (diskon) besar-besaran untuk menarik minat beli masyarakat. Dari sisi keuangan daerah, kegiatan ini berdampak pada peningkatan transaksi ekonomi dan perputaran uang di daerah. Selain meningkatkan daya beli, program ini juga memperkuat sektor perdagangan lokal dan memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Secara keseluruhan, berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Disperindag tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada dampak nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pasar murah, bazar, dan pemberian diskon, pemerintah daerah menjalankan fungsi stabilisasi harga, perlindungan daya beli, serta pemberdayaan

ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan juga sempat menoreh beberapa penghargaan dan juga prestasi atas pencapaian kinerja yang telah mereka laksanakan. Salah satunya adalah Pasar Kolpajung Pamekasan meraih juara II tingkat nasional untuk kategori Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat dari BPOM RI, yang diwakilkan oleh Kepala Disperindag Akhmad Basri Yulianto, S.H., M.Si dan diumumkan pada 10 Oktober 2025. Sebelumnya Disperindag Kabupaten Pamekasan juga memegang peranan penting dalam pembangunan rehabilitasi Pasar Kolpajung melalui perencanaan teknis, sosialisasi kepada pedagang, dan relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara di lapangan Kowel, serta pengawasan selama pembangunan berlangsung agar sesuai standar SNI.

Meskipun kinerja Disperindag baik juga transparan di setiap pekerjaan dan penggunaan anggarannya, serta diikuti dengan penghargaan atas pengelolaan pasar. Evaluasi kinerja pemerintahan tidak bisa diukur hanya dari keberhasilannya saja, tetapi juga pada kemampuan pemerintah itu sendiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara akuntabel. Keberhasilan kebijakan harus sejalan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi berita dari Radar Madura, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar Kolpajung dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 miliar, sehingga memunculkan perhatian dari DPRD terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam mengoptimalkan pendapatan pasar tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian program yang berdampak positif perlu diimbangi dengan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara keberhasilan pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai penerapan prinsip *good governance* secara menyeluruh.

Dari pembahasan di atas penulis sadar akan perlunya menelaah lebih dalam dan mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut: **(1)** Bagaimana bentuk akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran publik? **(2)** Program atau kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tahun 2025 serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan? **(3)** Mengapa masih terjadi kerugian PAD sebesar Rp 1,1 miliar di sektor Pasar meskipun Disperindag memperoleh berbagai capaian kinerja, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?

Tujuan dari adanya penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: **(1)** Untuk menganalisis bentuk akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan serta pelaporan anggaran publik sebagai wujud penerapan prinsip *good governance*. **(2)** Untuk mengidentifikasi program atau kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2025 serta menganalisis dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan. **(3)** Untuk mengkaji penyebab terjadinya kerugian Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di sektor Pasar Kolpajung meskipun terdapat berbagai capaian kinerja, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta didukung oleh *Digital Research Methods* untuk memperoleh data secara mendalam mengenai kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian ini difokuskan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sebagai sasaran penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan data melalui proses penelusuran digital yang relevan dengan tujuan penelitian, serta dikuatkan dengan ilmu pemahaman penulis untuk memberikan solusi dan opini yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran informasi digital berupa laporan kinerja, dokumen kebijakan, dan sumber informasi publik yang berkaitan dengan program kerja dan anggaran keuangan instansi. Analisis data dilakukan secara diskusi sesama penulis melalui tahapan pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan, dibandingkan, dan dimaknai untuk memperoleh gambaran yang tertata mengenai penerapan akuntabilitas dan kinerja instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung penulis mendapatkan data-data yang relevan, dikelompokkan dan disajikan melalui beberapa tabel disertai penjelasan naratif. Dipaparkan dalam subbab sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan dalam penggunaan anggaran, maka dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan indikator prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007).

Bentuk Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Anggaran Publik

Pada rumusan masalah pertama, penulis menemukan rincian data anggaran secara lengkap dalam situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Rincian anggaran yang dipublikasikan mencerminkan bahwa instansi ini sudah sangat transparan dari segi anggaran, data yang disajikan meliputi jenis anggaran belanja, peruntukannya, serta nilai dari tiap-tiap jenis belanja. Hal ini mencerminkan prinsip penting dalam pemerintahan yang baik, akuntabilitas kepada masyarakat atas segala aktivitas yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel sekaligus penjelasan dari setiap anggaran.

1.1. Program Sistem Informasi Industri Nasional

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
---------------	-------------	------------	-------

Barang Pakai Habis	ATK kantor	Operasional administrasi data industri	Rp 268.000
Barang Pakai Habis	Kertas & cover	Dokumen laporan industri	Rp 915.500
Barang Pakai Habis	Bahan cetak	Cetak buku & fotokopi	Rp 3.031.800
Barang Pakai Habis	Meterai	Legalitas dokumen	Rp 550.000
Barang Pakai Habis	Tinta printer	Pengolahan data industri	Rp 884.700
Barang Jasa	Konsumsi rapat	Rapat pengolahan data	Rp 3.500.000
Perjalanan Dinas	Luar daerah	Koordinasi industri	Rp 9.600.000
Perjalanan Dinas	Dalam daerah	Pengumpulan data lapangan	Rp 11.250.000
TOTAL			Rp 30.000.000

Berdasarkan tabel yang pertama tentang anggaran program Sistem Informasi Industri Nasional, Disperindag Pamekasan memiliki total anggaran sebesar Rp30.000.000. Anggaran ini difokuskan pada kegiatan administrasi dan operasional yang mendukung pengelolaan data industri daerah. Sebagian besar belanja pada tabel ini dialokasikan untuk barang pakai habis, seperti alat tulis kantor, kertas, bahan cetak, meterai, dan tinta printer untuk digunakan dalam proses pengolahan serta pelaporan data instansi.

Selain itu, dalam tabel ini juga mencantumkan belanja untuk konsumsi rapat yang bertujuan menunjang kegiatan koordinasi internal terkait pengelolaan sistem informasi. Kegiatan ini juga didukung oleh perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang digunakan untuk pengumpulan data industri di lapangan serta koordinasi dengan instansi terkait. Secara keseluruhan, program ini berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan data Disperindag Kabupaten Pamekasan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan di sektor industri daerah.

1.2. Program Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
Barang Pakai Habis	ATK	Administrasi perizinan	Rp 185.200
Barang Pakai Habis	Kertas	Dokumen izin	Rp 130.800
Barang Pakai Habis	Fotokopi	Penerbitan TDP gudang	Rp 334.200
Barang Pakai Habis	Meterai	Legalitas dokumen	Rp 110.000
Barang Pakai Habis	Tinta printer	Administrasi sistem	Rp 207.800

Barang Jasa	Konsumsi rapat	Rapat pelayanan izin	Rp 1.000.000
Perjalanan Dinas	Luar daerah	Koordinasi perizinan	Rp 1.732.000
Perjalanan Dinas	Dalam daerah	Pelayanan lapangan	Rp 2.300.000
TOTAL			Rp 6.000.000

Program penerbitan tanda daftar gudang memiliki total anggaran sebesar Rp6.000.000 yang digunakan untuk mendukung proses administrasi pelayanan perizinan gudang. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk kebutuhan administrasi perkantoran, seperti alat tulis kantor, kertas, fotokopi dokumen, meterai, dan tinta printer. Selain kebutuhan administrasi, anggaran juga digunakan untuk konsumsi rapat koordinasi yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan gudang. Secara keseluruhan, pada tabel ini hampir sama dengan tujuan pada tabel pertama tentang Program Sistem Informasi Industri Nasional, namun hanya lebih dispesifikan.

1.3.Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
Perjalanan Dinas	Dalam daerah	Operasional pembangunan sarana	Rp 5.625.000
Belanja Modal	Konsultansi pengawasan	Pengawasan konstruksi pasar	Rp 1.587.500
Belanja Modal	Konsultansi perencanaan	Perencanaan revitalisasi pasar	Rp 2.787.500
Belanja Modal	Revitalisasi pasar	Rehab pasar sore	Rp 40.000.000
TOTAL			Rp 50.000.000

Program Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan memiliki total anggaran sebesar Rp50.000.000. Anggaran ini difokuskan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, khususnya melalui pembangunan dan revitalisasi fasilitas pasar. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada belanja modal, yaitu untuk kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan agar dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

1.4.Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
Barang Jasa	Konsumsi rapat	Koordinasi pengelolaan pasar	Rp 5.250.000
Jasa	Pemeliharaan aplikasi pasar	Sistem informasi pasar	Rp 32.332.000
Perjalanan Dinas	Luar daerah	Pengelolaan sarana	Rp 7.700.000
Belanja Modal	Meja rapat	Sarpras pasar	Rp 2.523.000

Belanja Modal	Kursi rapat	Sarpras pasar	Rp 2.195.000
TOTAL			Rp 50.000.000

Program Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan memiliki total anggaran sebesar Rp50.000.000 yang digunakan untuk mendukung pengelolaan fasilitas perdagangan yang telah tersedia. Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana distribusi. Selain itu, terdapat alokasi anggaran untuk pemeliharaan aplikasi sistem informasi pasar yang berfungsi mendukung digitalisasi pengelolaan pasar. Pada aspek sarana pendukung, anggaran juga dialokasikan untuk belanja modal berupa pengadaan meja dan kursi rapat, yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi dan koordinasi pengelolaan pasar.

1.5.Pembinaan & Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
Barang Pakai H.	Cetak karcis pasar	Administrasi retribusi	Rp 90.002.000
Jasa	Pengangkutan sampah pasar	Kebersihan pasar	Rp 184.000.000
Jasa	Tagihan listrik pasar	Ops. fasilitas pasar	Rp 325.998.000
TOTAL			Rp 600.000.000

Berdasarkan tabel, program ini memiliki total anggaran terbesar Rp600.000.000 yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan pasar secara langsung. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja jasa, seperti pengangkutan sampah pasar dan pembayaran tagihan listrik pasar. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama program ini adalah menjaga keberlangsungan operasional fasilitas perdagangan serta menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman. Selain itu terdapat alokasi anggaran untuk pencetakan karcis pasar yang digunakan sebagai bagian dari sistem administrasi dan retribusi pasar. Program ini memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola pasar agar tetap tertib, bersih, dan berfungsi secara optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

1.6.Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
Barang Pakai Habis	ATK	Operasional pemberdayaan	Rp 519.400
Barang Pakai Habis	Kertas & administrasi	Operasional program	Rp 4.471.000
Barang Pakai Habis	Fotokopi	Dokumentasi kegiatan	Rp 300.600
Barang Pakai Habis	Materai	Legalitas	Rp 330.000

Barang Pakai Habis	Tinta printer	Administrasi	Rp 1.379.000
Barang Jasa	Konsumsi rapat	Rapat evaluasi	Rp 3.000.000
TOTAL			Rp 10.000.000

Program Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan memiliki total anggaran sebesar Rp10.000.000. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengelola pasar melalui kegiatan administrasi dan koordinasi. Sebagian besar anggaran digunakan untuk barang pakai habis. Selain itu, terdapat pula anggaran untuk konsumsi rapat yang digunakan dalam kegiatan koordinasi, evaluasi, serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola pasar dalam menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan efektif.

1.7. Pemantauan Harga & Stok Barang Pokok

Jenis Belanja	Sub Belanja	Peruntukan	Nilai
Barang Pakai Habis	ATK & tinta	Administrasi monitoring	Rp 985.800
Barang Pakai Habis	Kertas	Laporan pemantauan	Rp 654.000
Barang Pakai Habis	Cetak banner/stiker	Sosialisasi harga	Rp 7.912.200
Barang Pakai Habis	Meterai	Legalitas	Rp 550.000
Barang Jasa	Konsumsi rapat	Koordinasi pemantauan	Rp 6.550.000
Jasa	Honor narasumber	Sosialisasi kebijakan harga	Rp 1.500.000
Perjalanan Dinas	Luar daerah	Monitoring distribusi	Rp 10.448.000
Perjalanan Dinas	Dalam daerah	Pengawasan pasar	Rp 11.400.000
TOTAL			Rp 40.000.000

Program Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok memiliki total anggaran sebesar Rp40.000.000 yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Pada program ini juga terdapat alokasi anggaran untuk pencetakan banner dan stiker sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait informasi harga dan distribusi barang pokok. Program ini juga mencakup honor narasumber dalam kegiatan sosialisasi kebijakan perdagangan.

Berdasarkan pemaparan dari seluruh tabel di atas, dapat diketahui bahwa total keseluruhan anggaran program tahun 2025 mencapai Rp786.000.000. Jumlah anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Melalui pengalokasian anggaran tersebut, diharapkan setiap program dapat dilaksanakan

secara optimal, efektif, dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, jika ditinjau dari sisi transparansi dan akuntabilitas, telah mengarah pada penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Program dan Kegiatan yang Menjadi Prioritas dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2025 serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kabupaten Pamekasan

Selain kegemarannya dalam memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, di sisi lain Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan juga memberikan informasi yang jelas tentang seluruh program dan kegiatan yang telah mereka laksanakan selama satu periode di tahun 2025. Beberapa program dan kegiatan tersebut secara terbuka mereka publikasikan pada laman Disperindag.pamekasankab.go.id. Penulis mendapatkan data yang sangat jelas juga kompleks pada laman web tersebut. Adapun empat bidang yang terbagi pada Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, tiap-tiap bidang memberikan informasi kegiatannya pada masing-masing portal tersendiri. Keempat bidang itu adalah:

1. Bidang Perdagangan

Pada bidang ini, Disperindag Kabupaten Pamekasan di tahun 2025 memfokuskan pada Pasar Murah juga Pemantauan Harga Bahan Pokok. Pasar Murah di tahun 2025 dilakukan sebanyak tujuh kali, yaitu bertempat di Kantor Kecamatan Kota Pamekasan, Kantor Kelurahan Barutambat Kota, Kantor Kecamatan Pakong, Kantor Kecamatan Waru, Mandhapa Aghung Ronggosukowati/ Pendopo Bupati Pamekasan. Berdasarkan tinjauan berita, program Pasar Murah baru dilaksanakan pada tahun 2025 karena program ini baru dan masih dalam tahap uji coba.

Namun, berdasarkan kondisi pada saat jurnal ini ditulis (2026) ada sekitar 13 kali pelaksanaan program Pasar Murah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, dengan adanya program ini tidak hanya memberikan pelayanan harga barang bahan pokok yang murah, tetapi jika ditinjau di lain sisi, program ini memberikan dampak untuk menstabilkan harga bahan pokok dan meredam lonjakan harga sembako, terutama saat momen menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Lebaran. Masyarakat dengan mudah memperoleh kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, gula) dengan harga di bawah harga pasar normal, sehingga sangat membantu daya beli masyarakat kurang mampu, dan menjaga daya beli masyarakat menekan dampak akan inflasi sehingga menjaga perekonomian daerah. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, program ini juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Bulog. Tidak hanya program Pasar Murah saja yang gencar dilaksanakan, Disperindag Kabupaten Pamekasan Bidang Perdagangan juga rutin melakukan kegiatan monitoring stok dan harga bahan pokok. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga ekonomi daerah, memastikan kepatuhan harga eceran tertinggi (HET), memastikan kelancaran stok, dan mencegah penimbunan.

2. Bidang Pengelolaan Pasar

Sejalan dengan bidang dan tugasnya, informasi yang penulis peroleh pada bidang ini fokus kepada kebersihan, kenyamanan, pengelolaan pasar-pasar tradisional yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan. Pada 29 Agustus 2025 Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan melakukan penertiban pada pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, yang seringkali menyebabkan kemacetan bagi pengguna jalan di wilayah Waru sampai Pasean. Penertiban ini melibatkan anggota Satpol PP, TNI dan Polri Kabupaten Pamekasan, serta masyarakat sekitar.

Meskipun tidak ada hubungannya dengan akuntabilitas anggaran atau ekonomi, bidang ini juga rutin melakukan kegiatan kebersihan pasar. Kegiatan ini sebagai pondasi utama membangun ekonomi dan kesehatan masyarakat, menekankan pentingnya kebersihan dan kenyamanan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Dalam informasinya Kepala Disperindag yang baru Muharram, ST. Beserta staf jajarannya seringkali terjun langsung meninjau kegiatan ini. Berkat hal kecil tersebut Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan menerima Penghargaan dari BPOM RI di Jakarta sebagai juara II Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat yang diraih oleh Pasar Kolpajung.

3. Bidang Pembinaan dan Perlindungan

Tujuan utama dalam bidang ini meliputi pengawasan kuantitas dan kualitas BBM, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar. Pada bidang ini kegiatannya sering kali terjun langsung ke lapangan secara rutin dan seringkali meninjau SPBU yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tera ulang menjadi fokus utama yang sering dilakukan pada SPBU yang ada di Pamekasan, beberapa SPBU di antaranya terletak di Ambat 54.963.10, SPBU Larangan Tokol 963.07, SPBU Jl. Dirgahayu 54.963.09, SPBU Jalan Raya Sumenep 54.963.08. Tujuannya agar kuantitas BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan harga pembelian oleh masyarakat serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain tera ulang pada SPBU Bidang Pembinaan dan Perlindungan juga melakukan tera ulang rutin pada alat ukur tinggi dan berat, salah satunya milik Perum Bulog. Pengawasan barang beredar juga menjadi bagian dari kegiatan bidang ini, sejumlah toko kelontong juga toko modern yang ada di kawasan Kabupaten Pamekasan juga dicek secara bertahap dan memastikan semua produk memiliki standar halal sesuai aturan MUI, barang-barang tidak layak pakai dan tidak layak edar yang masih ditempatkan pada etalase juga turut dijadikan bahan evaluasi bagi pihak toko.

4. Bidang Perindustrian

Terakhir, ada Bidang Perindustrian yang pada tahun 2025 telah melakukan beberapa program dan kegiatan di antaranya pendataan dan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok). Pelatihan linting rokok, dan memfasilitasi dalam uji nutrisi, juga ada uji tar dan nikotin. Pada program pendataan dan pengawasan mesin pelinting sigarete fokus utamanya adalah untuk melakukan pendataan kepemilikan, lokasi, serta kondisi mesin pelinting sigaret di wilayah kabupaten, pengawasan ini

melibatkan Bea Cukai Madura dan bagian perekonomian Setda Pamekasan. Adapun kegiatan pelatihan linting rokok, Disperindag Kabupaten Pamekasan melalui bidang Perindustrian memfasilitasi 65 peserta dengan 3 orang mentor yang diharapkan nantinya ketika SIHT Pamekasan sudah beroperasi para pekerja ini dapat langsung bekerja secara profesional.

Cara Mengatasi Masalah Kerugian PAD Sebesar Rp 1,1 Miliar di Sektor Pasar

Beredar sebuah berita dari portal berita online (Radar Madura) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasar yang minus 1,1 Miliar rupiah, sehingga dewan menyoroji kinerja Disperindag Pamekasan. Pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan mengalami kerugian yang cukup signifikan, menyentuh nilai Rp1,1 miliar, kerugian ini disebabkan oleh Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), persentase capaian tersebut turun secara signifikan menjadi 67 persen. Tetapi jika mengacu pada target awal capaian persentasenya adalah 97 persen, yang awalnya target 2,4 Miliar naik menjadi 3,4 Miliar, ungkap Kepala Bidang Pasar Disperindag Pamekasan Handiko Bayuadi. Kenaikan target tersebut dinilai sangat memberatkan, mengingat keterbatasan potensi pasar yang ada. Dari total 12 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pamekasan, hanya tujuh yang benar-benar menjadi penopang utama pendapatan asli daerah. "Tujuh itu, Pasar Keppo, Waru, Pakong, 17 Agustus, Palengaan, Kolpajung, dan Pasar Gurem. Itu pun masih terbagi dengan adanya hari pasaran," tuturnya.

Menurut analisa penulis jika memang mengacu pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan berpatok pada target sebelum perubahan, hasilnya akan tetap sama, yaitu tidak mencapai target, masih defisit 100 juta. Permasalahan yang menjadi penghambat tidak tercapainya target di antara lain karena faktor alam, adanya penyakit hewan, hingga banyaknya pedagang yang pindah berjualan ke trotoar. Bahkan, rata-rata pedagang tidak berjualan saat musim tanam dan panen tembakau, ungkap Handiko Bayuadi.

Dari permasalahan di atas, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, meskipun pada bidang lain semua kegiatan dan program terlaksana dengan baik dan transparan, namun masih ada beberapa kebocoran yang perlu dibenahi bersama terkhusus pada Pendapatan Asli Daerah. Opsi yang telah penulis kaji dan di diskusikan bersama, diharapkan bisa membantu dalam memulihkan target Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui penerapan parkir berbasis elektronik. Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus menggencarkan SPBE guna pemanfaatan teknologi sebagai inovasi dan solusi cerdas. Penerapan parkir berbasis elektronik bisa diterapkan di setiap pasar terutama untuk 7 pasar penopang utama pendapatan. Pemerintah juga perlu menyediakan lahan yang cukup luas bagi ketujuh pasar tersebut, pembagiannya juga harus jelas, ada lahan bagi pengendara motor dan juga bagi mobil. Setiap pengendara motor dan mobil yang ingin memasuki kawasan pasar guna pendistribusian barang juga perlu ditarik dengan tarif yang terjangkau dan perlu dipastikan bahwa penggunaannya diperuntukkan untuk distribusi barang. Tentunya ide ini bersifat opini dari penulis, penerapannya dapat dipertimbangkan

sedemikian rupa guna menghindari kesalahpahaman, serta yang lebih mengetahui situasi dan medan setiap pasar adalah pemerintah daerah terkait.

alam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterbukaan informasi dan pelaksanaan berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Program yang dilaksanakan dapat mempertahankan harga yang stabil, meningkatkan daya beli masyarakat, serta membantu kegiatan perekonomian di daerah. Namun, kinerja tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar yang optimal. Penurunan PAD menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pasar, sehingga diperlukan upaya peningkatan agar kinerja pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah dapat berjalan secara seimbang.

Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam pengelolaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Pertama, Disperindag Kabupaten Pamekasan perlu meningkatkan evaluasi terhadap pengelolaan pasar, terutama pada pasar-pasar yang menjadi penopang utama PAD, agar pendapatan daerah dapat lebih optimal. Kedua, pemerintah daerah disarankan memanfaatkan sistem elektronik (*e-government*) dalam pengelolaan retribusi dan parkir pasar untuk meminimalkan kebocoran pendapatan serta meningkatkan efisiensi pengawasan. Ketiga, perlu dilakukan penataan ulang sarana dan prasarana pasar, termasuk penyediaan lahan yang lebih tertib bagi pedagang dan kendaraan, agar aktivitas ekonomi berjalan lebih nyaman dan teratur. Keempat, program-program yang sudah berjalan baik, seperti pasar murah dan pemantauan harga bahan pokok, perlu terus dipertahankan dan diperluas karena terbukti memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmawanti S, Dri. & dkk. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85-94
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. (2025). Website resmi Disperindag Pamekasan. Diakses pada 7 Februari 2026 <https://disperindag.pamekasankab.go.id/2025/>
- Fiddin, F. (2021). Akuntabilitas keuangan dan kompetensi aparatur sipil negara terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. *Jurnal Magisma*, 9(1), 63-70.
- Indah Purwaning Yuwana, Siti. & dkk. (2025). Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar: Analisis Peran DISPERINDAG Kabupaten Jember

- Dalam Konteks Akuntansi Manajemen. Menulis Jurnal Penelitian Nusantara. 1(2), 151-159.
- Irwati Tanan, Christina. & Ari Duri, Jimmi. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). Future Jurnal Manajemen Dan Akuntansi. 6(1), 91-101.
- Kutipan.co.id. (2022). Disperindag Pamekasan matangkan rencana pembangunan Pasar Kolpajung. Diakses pada 29 Januari 2026 <https://kutipan.co.id/disperindag-pamekasan-matangkan-rencana-pembangunan-pasar-kolpajung/>
- Mokobombang, W. 2022. Peranan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan pasar tradisional di kabupaten (studi kasus pasar rakyat sungguminasa). Journal of Administrative and Social Science. 3:61 66.
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2022). Tekan kebocoran PAD, wabup Pamekasan resmikan elektronik retribusi pasar. Diakses pada 9 Maret 2026 <https://pamekasankab.go.id/berita/841/tekan-kebocoran-pad-wabup-pamekasan-resmikan-elektronik-retribusi-pasar.html>
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2023). Disperindag Pamekasan relokasi pedagang Pasar Kolpajung secara bertahap. Diakses pada 6 Februari 2026 <https://pamekasankab.go.id/berita/1172/disperindag-pamekasan-relokasi-pedagang-pasar-kolpajung-secara-bertahap.html>
- Radar Madura. (2026). PAD pasar minus Rp 1,1 miliar, dewan soroti kinerja Disperindag. Diakses pada 16 Februari 2026 <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/747060263/pad-pasar-minus-rp-11-miliar-dewan-soroti-kinerja-disperindag>
- Rois, R. F., & Fanida, E. H. (2018). Akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Publika. Universitas Negeri Surabaya. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/22364/20501>
- Susanto, Hery. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi, 7(1), 81-92
- Tinangon, Suoth dkk. (2016) Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 4(1), 613-622.